DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X5 No. 4 - 9
Jakarta Selatan

259

272

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN RI.
TAHUN 1995/1996

DISPERPUSIP JATIM

Jakarta, 1996

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X5 No. 4 - 9
Jakarta Selatan

272

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN RI. TAHUN 1995/1996

DISPERPUSIP JATIM

Jakarta, 1996

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Depkes tahun 1995/1996, memuat tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan yang didasarkan atas sasaran, tujuan dan prioritas pengawasan yang telah ditetap kan dalam kebijaksanaan pengawasan Pelita VI.

Hasil pengawasan yang telah dicapai merupakan hasil maksimal berdasarkan potensi sumber daya yang ada, baik tenaga, anggaran maupun sarana dan prasarana yang ada.

Penuntasan penyelesaian tindak lanjut terhadap saran tindak yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan hal utama yang perlu diperhatikan, karena pada hakekatnya salah satu indikator keberhasilan pengawasan adalah terjadinya perbaikan atas penyimpangan yang terjadi.

Penyebab penyimpangan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern maupun ekstern pemerintah adalah karena kelemahan dalam unsur pengawasan melekat dengan penyebab utama adalah:

1. Kelemahan dalam unsur pembinaan personil
2. Kelemahan dalam unsur pencatatan dan pelaporan
3. Kelemahan dalam unsur perencanaan

Informasi masyarakat berupa pengaduan melalui TP.5000 maupun yang langsung disampaikan pada Departemen Kesehatan serta penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional masih tetap memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh.

Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat.

INSPEKTUR JENDERAL

Dr. Rusmono, SKM

DISPERPUSIP JATIM

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I U M U M

KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN 1

A. Kebijaksanaan Pengawasan..... 1
B. Kegiatan dan Sasaran Pengawasan 2
C. Ketenagaan 4
D. Anggaran 7

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM TAHUN 1995/1996

1. KEGIATAN PEMERIKSAAN ITJEN 8

A. Realisasi Kegiatan Pemeriksaan 8

B. Realisasi Penerbitan LHP 10

C. Temuan Pemeriksaan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP Itjen 11

1. Menurut Jenis Temuan 11
2. Menurut Program Depkes..... 13
3. Menurut Propinsi 15
4. Menurut Unit Utama 17

D. Penyebab Penyimpangan 19

E. Pemeriksaan Khusus 21

DISPERPUSIP JATIM

II. HASIL PEMERIKSAAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. Temuan Pemeriksaan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut 25

1. Menurut Jenis Temuan 25
2. Menurut Propinsi 28
3. Menurut Program Depkes..... 29
4. Menurut Unit Utama 31

B. Penyebab Penyimpangan 32

III. HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA

A. Temuan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BEPEKA 33

B. Penyebab Penyimpangan Temuan BEPEKA 35

IV. PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Pengaduan Masyarakat melalui TP. 5000 36

1. Menurut Jenis Informasi 37
2. Menurut Propinsi 38

V. PENYIMPANGAN DAN TINDAK PENERTIBAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI. 39

VI. PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA 40

DISPERPUSIP JATIM

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel. 1	KEADAAN JUMLAH PEGAWAI ITJEN DEPKES TAHUN 1995/1996 DISUSUN MENURUT JENIS JABATAN.	4
Tabel. 2	KEADAAN JUMLAH PEGAWAI ITJEN DEPKES TAHUN 1995/1996 DISUSUN MENURUT JENIS PANGKAT.	5
Tabel. 3	RINCIAN PEGAWAI ITJEN DEPKES TAHUN 1995/1996 DISUSUN MENURUT JABATAN DIBANDINGKAN DENGAN FORMASI YANG TERSEDIA.	6
Tabel. 4	REALISASI KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PEMAKAIAN HARI PEMERIKSAAN SELAMA TAHUN 1995/1996.	8
Tabel. 5	REALISASI PENERBITAN LHP ITJEN DEPKES DIBANDINGKAN DENGAN RENCANA PENERBITAN LAPORAN DAN PENUGASAN PEMERIKSAAN TAHUN 1995/1996.	10
Tabel. 6	TEMUAN, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES TAHUN 1995/1996 MENURUT JENIS TEMUAN.	12
Tabel. 7	TEMUAN, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES RI TAHUN 1995/1996 MENURUT PROGRAM DEPKES.	13
Tabel. 8	TEMUAN, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES TAHUN 1995/1996 MENURUT PROPINSI.	17
Tabel. 9	TEMUAN, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES TAHUN 1995/1996 MENURUT UNIT UTAMA.	18
Tabel. 10	PENYEBAB PENYIMPANGAN/KELEMAHAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES TAHUN 1995/1996 MENURUT KODE JENIS TEMUAN.	20
Tabel. 11	TEMUAN, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS ITJEN DEPKES TAHUN 1995/1996 MENURUT JENIS TEMUAN.	22
Tabel. 12	TEMUAN, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS ITJEN DEPKES TAHUN 1995/1996 MENURUT PROGRAM DEPKES.	24
Tabel. 13	TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP TAHUN 1995/1996 MENURUT JENIS TEMUAN.	25

PUSPERDUSIP JATIM

Tabel. 14	TEMUAN DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LHP BPKP TAHUN 1995/1996 MENURUT PROPINSI.	28
Tabel. 15	TEMUAN DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LHP BPKP TAHUN 1995/1996 MENURUT PROGRAM DEPKES.	30
Tabel. 16	TEMUAN DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LHP BPKP TAHUN 1995/1996 MENURUT UNIT UTAMA.	32
Tabel. 17	JUMLAH PENYEBAB PENYIMPANGAN TEMUAN BPKP TAHUN 1995/1996.	33
Tabel. 18	JUMLAH TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA TAHUN 1995/1996 MENURUT JENIS TEMUAN.	34
Tabel. 19	JUMLAH PENYEBAB PENYIMPANGAN TEMUAN BEPEKA TAHUN 1995/1996.	35
Tabel. 20	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TP 5000 TAHUN 1995/1996 MENURUT JENIS INFORMASI	37
Tabel. 21	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TP 5000 TAHUN 1995/1996 MENURUT PROPINSI.	38
Tabel. 22	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT LANGSUNG TAHUN 1995/1996 MENURUT UNIT ORGANISASI.	39
Tabel. 23	PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPKES RI MENURUT UNIT UTAMA TAHUN 1995/1996.	41

DISPERPUSIP JATIM

BAB I
U M U M

KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN.

Kebijaksanaan Pengawasan Itjen Depkes mengacu kepada kebijaksanaan pemerintah dibidang pengawasan yang tercantum dalam Inpres No.15 tahun 1993, Keppres 31 tahun 1983, yang intinya adalah :

Seluruh kegiatan pengawasan diintegrasikan kedalam sistem pengawasan yang terpadu dan ditempatkannya peranan pengawasan sebagai unsur mutlak dalam manajemen pemerintah dan pembangunan nasional.

Pokok-pokok kebijaksanaan pengawasan APFP disusun dengan memperhatikan arahan Menko EKKUWASBANG mengenai sistem pelaksa naan dan pengawasan pembangunan serta kebijaksanaan pengawasan untuk Repelita VI, yang materinya berdasarkan pada GBHN tahun 1993.

DISPERPUSIP JATIM

A. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN :

1. Sasaran umum pengawasan berorientasi pada penilaian pelaksanaan program-program Depkes baik rutin maupun pembangunan. Penentuan sasaran yang diperiksa berpedoman pada kriteria umum prioritas pengawasan.

2. Peningkatan penyelenggaraan latihan bagi tenaga pengawasan fungsional dalam metodologi pemeriksaan

3. Menunjang pembinaan dan pemantapan pedoman pengawasan me lekat dilingkungan Departemen Kesehatan.

4. Menunjang peningkatan pengendalian intern yang dilakukan oleh para Pengendali Program terhadap program-program Departemen Kesehatan.

5. Meningkatkan koordinasi pengawasan dengan lembaga-lembaga pengawasan yang lain.

6. Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan dan hasil pengawasan lainnya termasuk pengaduan masyarakat melalui Tromol Pos 5000.

7. Membentuk tenaga perbantuan pengawasan ditingkat Kanwil Propinsi guna meningkatkan jangkauan obyek dan sasaran pengawasan, untuk memantapkan penilaian keberhasilan program kesehatan.

B. KEGIATAN DAN SASARAN PENGAWASAN.

Memperhatikan Daftar Isian Kegiatan (DIK) Inspektorat Jenderal Depkes serta Daftar Isian Proyek (DIP) dan Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pengawasan Proyek-Proyek Departemen Kesehatan tahun 1995/1996, metode pemeriksaan, prioritas pemeriksaan dan lain-lain, maka disusun Rencana Kegiatan Inspektorat Jenderal Depkes tahun 1995/1996. Kegiatan dan sasaran pengawasan ini meliputi Kegiatan Perjalanan Dinas dan Kegiatan Non Perjalan Dinas.

1. Kegiatan Perjalanan Dinas terdiri dari :

   a. Pemeriksaan reguler terhadap pelaksanaan kegiatan Rutin dan Proyek Pembangunan dilingkungan Departemen Kesehatan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

DISPERPUSIP JATIM

Inspektorat Jenderal yaitu pemeriksaan di Pusat dan DKI Jakarta serta pemeriksaan di Propinsi.

b. Pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap masalah-masalah pelaksanaan kegiatan/program yang bersifat kasuistik (pemeriksaan khusus) berdasarkan atas laporan yang masuk melalui Tromol Pos 5000, pengaduan masyarakat yang langsung ke Departemen Kesehatan atau pemeriksaan khusus atas perintah Menteri Kesehatan.

c. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan unsur pengawasan fungsional lainnya serta peningkatan kemajuan proyek-proyek Depkes di Pusat, maupun di Propinsi.

d. Pemantauan Khusus Tindak Lanjut dari temuan hasil Pemeriksaan Khusus dan laporan pengaduan masyarakat yang langsung disampaikan kepada MENKES maupun melalui Tromol Pos 5000.

e. Pembinaan pengawasan meliputi pembinaan dibidang Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Tugas Umum & Proyek Pembangunan.

d. Pemutakhiran Data hasil pengawasan pelaksanaan anggaran Depkes yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia.

e. Pengolahan dan analisa data hasil pengawasan APFP.

f. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan ITJEN, BPKP, BEPEKA dengan Unit-Unit terkait.

g. Pemeriksaan Komprehensip.

DISPERPUSIP JATIM

2. Kegiatan Non Perjalanan Dinas terdiri dari:

a. Administrasi Proyek.
b. Pengadaan peralatan kantor.
c. Pencetakan buku hasil pengawasan.
d. Pelatihan sistem Pemeriksaan Operasional Terpadu bagi tenaga pemeriksa Inspektorat Jenderal Depkes.
e. Pelatihan tehnik pemeriksaan operasional terpadu bagi tenaga pengawas tingkat Propinsi.
f. Pengawasan Proyek ditingkat provinsi dengan memanfaatkan tenaga perbantuan pengawasan (27 Propinsi)

C. KETENAGAAN.

Keadaan pegawai Inspektorat Jenderal Depkes tahun 1995/1996 apabila disusun menurut Jenis Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

DISPERPUSIP JATIM

KEADAAN JUMLAH PEGAWAI ITJEN DEPKES DISUSUN MENURUT JENIS JABATAN TAHUN 1995/1996

Tabel 1

JENIS JABATAN	JUMLAH
Inspektur Jenderal	1
Sekretaris	1
Inspektur	4
Inspektur Pembantu	16
Kepala Bagian	4
Kepala Sub Bagian	10
Pemeriksa	67
Staf Sekretariat	89
J u m l a h	192

Pengelompokan menurut golongan pangkat, jenis tenaga teknis maupun administrasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

KEADAAN JUMLAH PEGAWAI ITJEN DEPKES DISUSUN MENURUT GOLONGAN KEPANGKATAN TENAGA TEKNIS, ADMINISTRASI TAHUN. 1995/1996

Tabel 2

PANGKAT	KEADAAN TAHUN	
	1994/1995	1995/1996
Pegawai Teknis		
Golongan IV	25	25
Golongan III	61	62
Golongan II	-	-
Sub Total	86	87
Pegawai Administrasi		
Golongan IV	4	3
Golongan III	31	37
Golongan II	67	63
Golongan I	3	2
J u m l a h	191	192

DISPERPUSIP JATIM

Dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, jumlah tenaga di lingkungan Itjen Depkes tahun 1995/1996 tidak menunjukkan kenaikan yang berarti, baik untuk tenaga teknis maupun tenaga administrasi.

Perbandingan jumlah pegawai teknis dan administrasi menunjukkan proporsi yang belum ideal,dimana tenaga administrasi, sebagai penunjang tenaga teknis dalam menja lankan tugas pokok pengawasan, jumlahnya jauh lebih besar yakni 104 orang (54%), bila dibandingkan dengan tenaga tek nis yang jumlahnya hanya 88 orang (46%).
Sedangkan keadaan jumlah pegawai Itjen Depkes apabila di susun menurut jabatan, dibandingkan dengan formasi yang tersedia adalah sebagai berikut :

RINCIAN PEGAWAI ITJEN DEPKES DISUSUN MENURUT JABATAN DIBANDINGKAN DENGAN FORMASI YANG TERSEDIA TAHUN 1995/1996

Tabel 3

JABATAN	PEGAWAI TEKNIS		PEGAWAI ADMINISTRASI	
	JABATAN YG TLH TERISI	FORMASI	JABATAN YG TLH TERISI	FORMASI
	(1)	(2)	(3)	(4)
ESELON I	1	1	-	-
ESELON II	4	4	1	1
ESELON III	16	16	4	4
ESELON IV	67	80	10	11
PELAKSANA	-	-	89	102
JUMLAH	88	101	104	118

DISPERPUSIP JATIM

Rendahnya jumlah tenaga teknis terlihat belum terpenuhinya formasi yang tersedia. Sedangkan besarnya jumlah tenaga administrasi dapat dilihat perbandingan pada Pejabat Struktural Eselon IV dengan Staf Pelaksana, yaitu 1:9.

D. ANGGARAN.

Anggaran ITJEN DEPKES tahun 1995/1996 yang tersedia untuk pelaksanaan tugas pengawasan sebesar Rp. 4.443.525.000,- terdiri dari anggaran rutin Rp. 2.390.720.000,- (53,8%) dan proyek pembangunan sebesar Rp.2.052.805.000,- (46,2%). Apabila dibandingkan dengan anggaran Depkes (Rutin + Pembangunan + OPRS + BLN) sejumlah Rp. 1,37 triliyun, maka bobot anggaran Itjen Depkes hanya sebesar 0,32% dari anggaran Depkes.

Realisasi anggaran Itjen tahun 1995/1996 (Rutin + Pembangunan) adalah Rp.4.002.564.150,- (90,0%) yang terdiri dari realisasi anggaran rutin Rp.2.371.082.200 atau 99,18 % (termasuk belanja pegawai) dan proyek pembangunan Rp.1.631.481.950,- (79,5%). Anggaran yang tersedia tersebut dapat menjangkau 267 Obyek Pemeriksaan atau sekitar 12,8% dari obyek pemeriksaan yang ada.

DISPERPUSIP JATIM

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM TAHUN 1995/1996

1. KEGIATAN PEMERIKSAAN ITJEN.

A. Realisasi Kegiatan Pemeriksaan

Jumlah obyek yang telah diperiksa dalam tahun 1995/1996 berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 266 Obyek Pemeriksaan, meliputi 242 Obyek Pemeriksaan Reguler dan 23 Obyek Pemeriksaan Khusus serta 1 satker pemeriksaan diluar PKPT. Jika dibandingkan dengan target dalam PKPT (280 Obyek) maka realisasi pemeriksaan dalam tahun 1995/1996 telah dicapai 95% dari target. Jumlah HP (Hari Pemeriksaan) yang digunakan adalah 12.920 HP (86% dari target). Realisasi pemeriksaan dan penggunaan HP dibandingkan dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), diuraikan pada tabel berikut :

REALISASI KEGIATAN DAN PEMAKAIAN HARI PEMERIKSAAN SELAMA TAHUN 1995/1996

Tabel 4

JENIS PEMERIKSAAN	PKPT TAHUN INI		REALISASI PEMERIKSAAN TAHUN 1995/1996			
					% THD PKPT SETAHUN	
	OP	HP	OP	HP	OP	HP
Pemeriksaan Reguler (PKPT)						
Satuan Kerja	83	4424	85	2937	102	66
Proyek	161	8820	157	8940	97	101
Sub Jumlah	244	13244	242	11877	99	90

DISPERPUSIP JATIM

JENIS PEMERIKSAAN	PKPT TAHUN INI		REALISASI PEMERIKSAAN TAHUN 1995/1996			
					% THD PKPT SETAHUN	
	OP	HP	OP	HP	OP	HP
Pemeriksaan Khusus	36	1728	23	494	64	29
Jumlah	280	14972	265	12371	95	83
Pemeriksaan diluar PKPT						
Satker	-	-	1	549	-	-
Proyek	-	-	-	-	-	-
Jumlah	280	14972	266	12920	95	86

Dari tabel tersebut diatas dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi kegiatan pemeriksaan reguler tidak mencapai seratus persen (99%) dari target yang ditetapkan dalam PKPT, karena ada 2 (dua) obyek pemeriksaan yang telah diperiksa oleh BPKP, sehingga tidak diperiksa oleh Itjen Depkes.

b. Pemeriksaan Khusus dilaksanakan terhadap 23 kasus atau sekitar 64% dari 36 kasus yang ditargetkan pada tahun anggaran 1995/1996.

c. Secara keseluruhan pemeriksaan yang dilaksanakan dalam tahun 1995/1996 adalah 266 Obyek Pemeriksaan atau 95% dari target pemeriksaan dalam PKPT. Penggunaan Hari Pemeriksaan (HP) adalah sebanyak 12.920 HP atau 86% dari target yang ditetapkan.

DISPERPUSIP JATIM

B. Realisasi Penerbitan LHP.

Jumlah Penerbitan LHP dalam tahun 1995/1996 meliputi pemeriksaan reguler dan Pemeriksaan Khusus, apabila dibandingkan dengan Rencana Penerbitan LHP (RPL) dan Penugasan Pemeriksaan (PP) dapat digambarkan dalam tabel berikut :

REALISASI PENERBITAN LHP ITJEN DEPKES
DIBANDINGKAN DENGAN RENCANA PENERBITAN LAPORAN DAN PENUGASAN PEMERIKSAAN TAHUN 1995/1996

Tabel 5

JENIS PEMERIKSAAN	RPL DALAM PKPT	PENUGASAN PEMERIKSAAN (PP)	REALISASI PENERBITAN LHP	% TERHADAP	
				RPL	PP
Pemeriksaan Reguler					
Satuan Kerja	85	85	85	100	100
Proyek	157	157	157	100	100
Sub Jumlah	242	242	242	100	100
Pemeriksaan Khusus	23	23	23	100	100
Jumlah	265	265	265	100	100
Pemeriksaan diluar PKPT					
Satker	1	1	1	100	100
Proyek	-	-	-	-	-
	266	266	266	100	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Penugasan Pemeriksaan (PP) reguler terhadap satuan kerja maupun proyek pembangunan telah mencapai 100 %.

DISPERPUSIP IMTIM

b. Realisasi penerbitan LHP berdasarkan Penugasan Pemeriksaan (PP) adalah 100%, tetapi apabila dibandingkan dengan rencana penerbitan LHP yang tercantum dalam PKPT baru mencapai 95%. Hal ini karena ada 2 obyek yang tidak diperiksa, karena sudah diperiksa oleh BPKP. Pelaksanaan pemeriksaan khusus tidak mencapai target yang telah direncanakan karena terlambatnya waktu yang tersisa diluar pemeriksaan reguler.

C. TEMUAN PEMERIKSAAN DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LHP ITJEN.

1. Menurut Jenis Temuan

Berdasarkan 242 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Itjen Depkes tahun 1995/1996 yang terdiri dari 85 LHP Satuan Kerja, 157 LHP Proyek Pembangunan dan 1 LHP diluar PKPT, telah dihasilkan 677 temuan dan 1361 saran tindak (rekomendasi). Pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan saran tindak selama 1 (satu) tahun anggaran adalah 978 saran tindak (71,8%).

Jumlah temuan, saran tindak dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan jika dirinci menurut jenis temuan adalah sebagai berikut :

DISPERPUSIP JATIM

TEMUAN, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT
HASIL KEGIATAN PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES RI
MENURUT JENIS TEMUAN TAHUN 1995/1996

Tabel 6

KODE	JENIS TEMUAN	JUMLAH TEMUAN	PROSENTASE	SARAN TINDAK	TINDAK LANJUT	PROSENTASE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kebocoran yang merugikan negara	29	4,3	83	51	61,4
02	Kewajiban penyetoran kepd negara	37	5,5	60	42	70,0
03	Pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku	112	16,6	223	165	87,4
04	Pelanggaran terhadap prosedur dan tatakerja yang telah ditentukan	66	9,7	129	99	76,7
05	Penyimpangan dari ketentuan anggaran	37	5,5	71	39	54,9
06	Hambatan terhadap kelancaran pembangunan	41	6,0	82	74	90,2
07	Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok	64	9,4	142	103	72,5
08	Kelemahan administrasi	92	13,6	175	140	80,0

DISPERPUSIP JATIM

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09	Ketidak lancaran pelayanan kepada masyarakat	17	2,5	27	15	55,5
10	Temuan pemeriksaan lainnya	182	26,9	369	250	67,7
	J u m l a h	677	100	1361	978	71,8

Dari tabel tersebut diatas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 677 temuan hasil pemeriksaan Itjen Depkes tahun 1995/1996 yang menonjol adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (03) sebanyak 112 temuan (16,6%), kelemahan administrasi (08) 92 temuan (13,6%) dan pelanggaran terhadap prosedur dantata kerja (04) 66 temuan (9,7%) disamping temuan pemeriksaan lainnya sebanyak 182 temuan (26,9%).

b. Rata-rata jumlah saran tindak (rekomendasi) per jumlah temuan adalah 2 (dua) saran tindak (1361 saran tindak terhadap 677 temuan).

c. Dari 1361 saran tindak telah ditindak lanjuti sebanyak 978 saran tindak (71,8%). Saran tindak yang belum ditindaklanjuti masih dalam proses penyelesaian dan akan terus dipantau sampai tuntas pada tahun-tahun berikutnya.

DISPERPUSIP JATIM

d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan apabila dirinci menurut jenis temuan, yang berada dibawah angka rata-rata (71,8%) adalah pada jenis temuan penyimpangan dari ketentuan anggaran (05) 54,9%, ketidak lancaran pelayanan kepada masyarakat (09) 55,5%.

2. **Menurut Program Depkes.**

Mulai tahun 1995/1996 diberlakukan penggabungan program Rutin dan Pembangunan menjadi satu, yaitu Program Departemen Kesehatan. Dari 243 LHP reguler tahun 1995/96, apabila dipaparkan menurut Program Depkes, maka rincian temuan, saran tindak dan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

TEMUAN, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT
HASIL KEGIATAN PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES RI
MENURUT PROGRAM DEPKES TAHUN 1995/1996

Tabel. 7

PROGRAM DEPKES	TEMUAN		SARAN	TINDAK LANJUT	
	JUMLAH	%	TINDAK	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Program Pokok					
I.1 Penyuluhan Kes Masyarakat	28	4,4	40	18	45,0
I.2 Pelayanan Kes. Masy	231	35,4	471	286	60,7
I.3 Pelayanan Kes Rujukan & RS	102	16,1	207	166	80,2
I.4 Pencegahan & Pembrant Peny	28	4,2	54	30	55,5
I.5 Perbaikan Gizi	12	1,9	23	22	95,6
I.6 Pengawasan Obat & Makanan	30	4,7	63	39	6,9
I.7 Pembin Pengobatan Tradis	-	-	-	-	-
II. Program Penunjang					
II.8 Penyed & Pengaw Air Bersih	13	2,0	25	22	88,2
II.9 Penyehat Ling.Pemukiman	7	1,2	12	3	25,0
II.10.a Pendd Kedinasan	169	25,0	344	311	90,0
II.10.b Pendd & Pelat Apart Neg	-	-	-	-	-
II.11 Pengkaj & Lit Ilpeng Trap	7	1,2	17	15	88,2
II.13 Pembin & Pengemb Pemuda	5	0,8	11	6	54,5
II.14 Peranan Wanita	-	-	-	-	-
II.15 Pengemb Sistim Infor Kes	3	0,7	3	3	100
II.16 Pengemb Sistim Hukum Nas	-	-	-	-	-
III. Program Umum					
III.17 Peningk Pras & Sar Apart Negara.	6	0,9	12	11	92,0
III.18 Peningk Efisi Apart Neg	10	1,5	14	10	71,0
III.19 Penday Sistem & Pelak Was	26	3,8	65	36	55,4
J u m l a h	677	100	1361	978	71,8

PUSPERRUSIP JATIM

Memperhatikan tabel tersebut diatas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil temuan dan saran tindak pada Program Yankesmas, Pendidikan Kedinasan dan Yankes Rujukan & RS menunjukkan angka lebih besar jika dibandingkan dengan program lainnya, hal ini disebabkan sasaran pemeriksaan pada tahun 1995/1996 lebih diarahkan terhadap program tersebut.

b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan perprogram Depkes rata-rata 71,8%.

c. Program-program yang pelaksanaan tindak lanjutnya berada diatas angka rata-rata (71,8%) adalah program Yankes Rujukan & RS (80,2%), Penyed & PAB (88,2%), Pengkajian & Penelitian (88,2%), Pend. Kedinasan (90,0%), Peningk Prasarana (92,0%), Perbaikan Gizi (95,6%).

d. Sedangkan program yang pelaksanaan tindak lanjut dibawah angka rata-rata (71,8%) Pengawasan Obat & Makanan (6,9%), Penyet Lingk. Pemukiman (25,0%), Penyuluhan Kes Masyarakat (45,0%), Pembin & Pengemb Pemuda (54,5%), Pencegahan & Pemberant Peny (55.3%), Penday Sistem & Pelak Was (55,4%),Pelayanan Kes Masy (60,7%), Peningk Efis Apart Negara (71,0%).

3. **Menurut Propinsi**

Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap obyek-obyek baik Satuan Kerja maupun Proyek Pembangunan yang tersebar di Pusat dan di 27 propinsi. Berdasarkan PKPT, setiap provinsi dikunjungi antara 2 - 3 kali dalam setahun yang mencakup 8 - 12 obyek pemeriksaan.

DISPERPUSIP JATIM

Selama tahun 1995/1996 Itjen Depkes telah melaksanakan pemeriksaan reguler sebanyak 243 obyek yang meliputi 85 Satuan Kerja, 157 Proyek Pembangunan dan 1 obyek pe meriksaan diluar PKPT.

Secara rinci hasil kegiatan pemeriksaan Itjen Depkes berdasarkan propinsi adalah sebagai berikut:

DISPERPUSIP JATIM

TEMUAN, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES RI MENURUT PROPINSI TAHUN 1995/1996

Tabel.8

NO	PROPINSI	TEMUAN		SARAN	TINDAK LANJUT		JUMLAH LHP
		JUMLAH	%	TINDAK	JUMLAH	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DKI JAKARTA	77	11,7	174	78	44,8	29
2	JAWA BARAT	27	4,0	54	44	81,5	9
3	JAWA TENGAH	22	3,3	49	49	100	9
4	DI YOGYAKARTA	11	1,6	25	23	92,0	6
5	JAWA TIMUR	24	3,7	49	32	65,0	9
6	DI ACEH	21	3,1	44	44	100	6
7	SUMATERA UTARA	14	2,0	28	28	100	9
8	SUMATERA BARAT	22	3,2	41	39	95,0	6
9	R I A U	19	2,8	40	40	100	6
10	J A M B I	16	2,4	31	15	48,0	6
11	SUMATERA SELATAN	21	3,1	42	40	95,0	9
12	LAMPUNG	23	3,4	48	48	100	9
13	KALIMANTAN BARAT	18	2,7	35	31	89,0	6
14	KALIMANTAN TENGAH	29	4,3	49	40	82,0	9
15	KALIMANTAN SELATAN	21	3,1	42	18	43,0	7
16	KALIMANTAN TIMUR	14	2,0	29	17	58,6	6
17	SULAWESI UTARA	13	1,0	27	21	87,5	9
18	SULAWESI TENGAH	16	2,7	36	26	72,2	6
19	SULAWESI SELATAN	28	4,2	54	41	75,9	9
20	SULAWESI TENGGARA	28	4,2	45	11	24,4	6
21	M A L U K U	35	5,1	77	62	80,5	9
22	B A L I	24	3,7	48	45	93,7	9
23	NUSA TENGGARA BARAT	24	3,7	46	36	78,2	9
24	NUSA TENGGARA TIMUR	29	4,3	52	40	76,9	9
25	IRIAN JAYA	19	2,8	33	24	72,7	6
26	BENGKULU	16	2,4	36	36	100	6
27	TIMTIM	6	0,9	9	8	88,8	3
28	P U S A T	60	8,6	118	42	35,6	21
	J U M L A H	677	100	1361	978	71,8	243

Dari tabel tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa:

a. Rata-rata jumlah temuan yang dihasilkan disetiap propinsi diluar DKI Jakarta dan Pusat adalah 20 temuan, dengan rincian cukup banyak pada propinsi, Maluku 35 temuan, Kalteng, NTT masing-masing 29 temuan, Sulsel, Sultra 28 temuan, dan Jabar 27 temuan.

DISPERPUSIP JATIM

Hal ini menunjukkan bahwa pada propinsi-propinsi tersebut masih perlu pembinaan lebih intensif agar pelaksanaan kegiatan baik rutin maupun proyek pembangunan dapat berjalan dengan baik.

b. Propinsi-propinsi yang pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaannya cukup baik,(antara 75,0% - 100%) adalah, Propinsi Sulsel (75,9%), NTT (76,9%), NTB (78,2%) Jabar (81,5%), Kalteng (81,6%), sedangkan propinsi-propinsi yang pelaksanaan tindak lanjutnya masih rendah dan perlu peningkatan, berkisar antara 24,4% - 50,0% adalah : Pusat (35,6%), Kalsel (42,8%), DKI (44,8%), Jambi (48,8%).

4. Menurut Unit Utama

Sesuai dengan tugas dan fungsinya unit utama adalah penanggung jawab program pelaksanaan kegiatan di Departemen Kesehatan. Dalam pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan terhadap obyek-obyek pemeriksaan, peranan unit utama sangatlah besar, yaitu bertanggungjawab terhadap tindakan korektif atas saran tindak yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan, sehingga perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan baik proyek pembangunan maupun kegiatan rutin pada satuan kerja yang ada dalam tanggungjawabnya.

Hasil pemeriksaan Itjen Depkes tahun 1995/96 dalam bentuk temuan, saran tindak dan tindak lanjut apabila disusun menurut unit utama dapat dilihat pada tabel berikut:

TEMUAN, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES RI MENURUT UNIT UTAMA TAHUN 1995/1996

Tabel. 9

NO	UNIT UTAMA	TEMUAN		SARAN	TINDAK LANJUT	
		JUMLAH	%	TINDAK	JUMLAH	%
1	Sekretariat Jenderal	231	34,1	466	368	79,0
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	-	-
3	Ditjen Binkesmas	276	40,8	546	394	72,1
4	Ditjen Yanmedik	83	12,2	176	116	65,9
5	Ditjen PPM & PLP	48	7,1	91	61	67,0
6	Ditjen POM	32	4,8	63	25	39,7
7	Badan Litbangkes	7	1,0	19	14	73,7
	J u m l a h	677	100	1361	978	71,8

DISPERPUSIP UNM

Dari tabel diatas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Sesuai dengan sasaran pemeriksaan tahun 1995/1996, unit utama yang mendapat temuan terbanyak adalah pada Ditjen Binkesmas Depkes RI sebanyak 276 temuan (40,8%) dan Setjen 231 temuan (34,1%).

b. Pelaksanaan tindak lanjut berkisar antara 39,7%-79,0% dengan rata-rata 71,8%.

c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada unit utama secara bertahap diadakan pemutahiran data dengan Itjen Depkes untuk menuntaskan saran tindak dan mencari jalan keluar agar pelaksanaan tindak lanjut dapat segera dilaksanakan dengan tuntas.

D. Penyebab Penyimpangan

Dihasilkannya temuan pemeriksaan tidak lepas daripada penyebab penyimpangan yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan baik yang menyangkut masalah keuangan maupun fisik kegiatan.

Untuk mempermudah pengelompokan jenis penyimpangan, pelaporan dan intervensi perbaikan, BPKP telah menetapkan kodifikasi penyimpangan sebagai berikut :

101 = Kelemahan dalam organisasi
102 = Kelemahan dalam kebijakan/kebijaksanaan
103 = Kelemahan dalam rencana
104 = Kelemahan dalam prosedur
105 = Kelemahan dalam pencatatan & Pelaporan
107 = Kelemahan dalam pengawasan intern (internal review)

DISPERPUSIP JATIM

201 = Penyebab ekstern hambatan kelancaran proyek

202 = Penyebab ekstern hambatan kelancaran tugas pokok instansi

203 = Penyebab ketidaklancaran pelayanan aparatur pemerintahan/ BUMN/BUMD kepada masyarakat.

206 = Kelemahan dalam pembinaan personil

Berdasarkan hasil pemeriksaan Itjen Depkes tahun 1995/96 diketemukan penyebab penyimpangan seperti dalam tabel berikut:

PENYEBAB PENYIMPANGAN/KELEMAHAN
HASIL PEMERIKSAAN ITJEN DEPKES RI
TAHUN 1995/1996

DIGITAL PUSIP JATIM

Tabel. 10

KODE	U R A I A N	JUMLAH	%
	A.KELEMAHAN PENGAWASAN MELEKAT		
101	KELEMAHAN DALAM ORGANISASI	31	5,4
102	KELEMAHAN DALAM KEBIJAKAN	96	16,7
103	KELEMAHAN DALAM RENCANA	87	15,1
104	KELEMAHAN DALAM PROSEDUR	77	13,4
105	KELEMAHAN DALAM PENCATATAN DAN PELAPORAN	57	9,9
106	KELEMAHAN DALAM PEMBINAAN PERSONIL	190	33,1
107	KELEMAHAN DALAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL REVIEW)	37	6,4
	S U B T O T A L I	575	100
	B. PENYEBAB LAIN DILUAR KELEMAHAN PENGAWASAN MELEKAT		
201	PENYEBAB EKSTERN HAMBATAN KELANCARAN PROYEK	144	59
202	PENYEBAB EKSTERN HAMBATAN KELANCARAN TUGAS POKOK INSTANSI	77	31,6
203	PENYEBAB KETIDAK LANCARAN PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH/BUMN/BUMD KEPADA MASYARAKAT	23	9,4
	S U B T O T A L II	244	100
	J U M L A H	819	100

Dari ikhtisar tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penyebab utama penyimpangan/kelemahan dari temuan hasil pemeriksaan Itjen Depkes adalah :

- Kelemahan dalam pembinaan personil (kode 106) sebanyak 190 penyebab (33,1%)
- Kelemahan dalam kebijakan / kebijaksanaan (kode 102) sebanyak 96 penyebab (16,7%)
- Penyebab ekstern hambatan kelancaran proyek (kode 201) sebanyak 144 (59,0%)

Melihat gambaran penyebab utama penyimpangan, maka perlu adanya peningkatan proses perencanaan dengan melihat kebutuhan program dari bawah (bottom up) dan juga melihat jumlah dan kemampuan personil yang melaksanakannya serta memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

E. Pemeriksaan Khusus.

Disamping melaksanakan pemeriksaan reguler, Inspektorat Jenderal Depkes juga melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat yang masuk melalui Tromol Pos 5000, kasus-kasus tertentu atas perintah Menteri Kesehatan ataupun hal-hal lain yang dianggap perlu dilaksanakannya pemeriksaan khusus.

Selama tahun 1995/1996, Itjen Depkes telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 23 kasus yang menghasilkan 35 temuan dan 35 saran tindak. Berdasarkan saran tindak yang ada telah ditindaklanjuti sebanyak 40,0% (14 saran tindak).

DISPERPUSIP JATIM

Jenis kasus-kasus yang telah diperiksa khusus, dikelompokkan dalam katagori:

1. Penyalagunaan wewenang oleh pejabat-pejabat dilingkungan Depkes.
2. Penilaian atas pelaksanaan Kanwil Depkes.
3. Pemeriksaan khusus terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Satuan Kerja/Proyek Pembangunan.

Apabila dikelompokkan menurut jenis temuan, maka hasil pemeriksaan khusus Itjen Depkes tahun 1995/96 dapat dilihat dalam tabel berikut:

TEMUAN, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS ITJEN DEPKES RI
MENURUT JENIS TEMUAN TAHUN 1995/1996

Tabel. 11

KODE	JENIS TEMUAN	JUMLAH TEMUAN	PROSEN TASE	SARAN TINDAK	TINDAK LANJUT	PROSEN TASE
01	Kebocoran yang merugikan negara	1	2,8	1	0	0
02	Kewajiban penyetoran kepada negara	2	5,7	2	1	50
03	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	17	48,7	20	7	41,2
04	Pelanggaran terhadap prosedur dan tatakerja yang telah ditentukan	-	-	-	-	-
05	Penyimpangan dari ketentuan aggaran	1	2,8	11	0	0
06	Hambatan terhadap kelancaran pembangunan	-	-	-	-	-
07	Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok	1	2,8	12	0	0
08	Kelemahan administrasi	2	5,7	14	2	100
09	Ketidak lancaran pelayanan kepada masyarakat	-	-	-	-	-
10	Temuan pemeriksaan lainnya	11	31,5	16	4	12,9
	J u m l a h	35	100	76	14	40,0

DISPERPUSIP JATIM

Dari tabel diatas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 23 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tahun 1995/1996 dihasilkan 35 temuan dengan perincian temuan yang menonjol adalah (03) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 17 temuan (48,7%) disamping temuan pemeriksaan lainnya sebanyak 11 temuan (31,5%).

b. Dari seluruh saran tindak yang telah ada tindak lanjutnya baru mencapai 40,0%.

Pemeriksaan Khusus Menurut Program Depkes.

Penyebaran pemeriksaan khusus tidak merata di seluruh program Depkes, karena pelaksanaan pemeriksaan khusus didasarkan atas kasus-kasus yang muncul pada periode tertentu. Untuk tahun 1995/96 kasus-kasus yang ditangani melalui pemeriksaan khusus, ternyata hanya pada program-program, sebagai berikut:

a. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (2 kasus)
b. Yankes Rujukan & RS (24 kasus)
c. Sarana & Prasarana (4 kasus)
d. Pelatihan Aparatur Negara (5 kasus)

Secara rinci jumlah temuan, saran tindak dan tindak lanjut menurut program Depkes tertera pada tabel berikut :

DISPERPUSIP JATIM

TEMUAN, SARAN TINDAK DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS ITJEN DEPKES RI
MENURUT PROGRAM DEPKES TAHUN 1995/1996

Tabel. 12

PROGRAM DEPKES	TEMUAN		SARAN	TINDAK LANJUT	
	JML	%	TINDAK	JML	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
I. **Program Pokok**					
I.1 Penyuluhan Kes Masyarakat	2	5,7	-	1	50,0
I.2 Pelayanan Kes. Masy	-	-	-	-	-
I.3 Pelayanan Kes Rujukan & RS	24	68,5	-	9	37,5
I.4 Pencegahan & Pembrant Peny	-	-	-	-	-
I.5 Perbaikan Gizi	-	-	-	-	-
I.6 Pengawasan Obat & Makanan	-	-	-	-	-
I.7 Pembin Pengobatan Tradis	-	-	-	-	-
II. **Program Penunjang**					
II.8 Penyed & Pengaw Air Bersih	-	-	-	-	-
II.9 Penyehat Ling.Pemukiman	-	-	-	-	-
II.10.a Pendd Kedinasan	-	-	-	-	-
II.10.b Pendd & Pelat Apart Neg	5	14,3	-	2	40
II.11 Pengkaj & Lit Ilpeng Trap	-	-	-	-	-
II.13 Pembin & Pengemb Pemuda	-	-	-	-	-
II.14 Peranan Wanita	-	-	-	-	-
II.15 Pengemb Sistim Infor Kes	-	-	-	-	-
II.16 Pengemb Sistim Hukum Nas	-	-	-	-	-
III. **Program Umum**					
III.17 Peningk Pras & Sar Apart Negara.	4	11,5	-	2	50,0
III.18 Peningk Efisi Apart Neg	-	-	-	-	-
III.19 Penday Sistem & Pelak Was	-	-	-	-	-
J u m l a h	35	100	-	14	40,0

Memperhatikan tabel diatas dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan tindak lanjut berkisar antara 37,5% - 50,0% dengan rata-rata pelaksanaan tindak lanjut sebesar 44,0%.

DISPERPUSIP JATIM

II. HASIL PEMERIKSAAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. TEMUAN PEMERIKSAAN DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT.

Inspektorat Jenderal Depkes RI, selain bertanggungjawab memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Depkes, juga melaksanakan pemantauan terhadap hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional lainnya, antara lain hasil pemeriksaan dari BPKP.

Dalam pelaksanaan pemantauan temuan hasil pemeriksaan BPKP. Tim Pemantau Itjen Depkes melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan untuk menentukan apakah saran atas temuan hasil pemeriksaan sudah ditindak lanjuti secara tuntas atau belum.

1. **Menurut Jenis Temuan**

Pada tahun 1995/96, Inspektorat Jenderal Depkes telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP sebanyak 245 LHP terdiri dari 78 LHP Satuan Kerja, 126 LHP Proyek Pembangunan dan 41 LHP BUMN. Berdasarkan LHP tersebut, dihasilkan 543 temuan dan telah ditindaklanjuti sebesar 45,7%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP MENURUT JENIS TEMUAN TAHUN 1995/1996

Tabel.13

KODE	JENIS TEMUAN	JUMLAH TEMUAN	PROSENTASE	JUMLAH T.L.	PROSENTASE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kebocoran yang merugikan negara	87	16,0	45	51,7
02	Kewajiban penyetoran kepada negara	71	13,1	31	43,7

DISPERPUSIP JATIM

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
03	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	33	6,1	11	33,3
04	Pelanggaran terhadap prosedur dan tatakerja	48	8,8	29	60,4
05	Penyimpangan dari ketentuan aggaran	49	9,0	28	57,1
06	Hambatan terhadap kelancaran pembangunan	23	4,2	11	47,8
07	Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok	53	9,8	26	49,1
08	Kelemahan administrasi	102	18,8	35	34,3
09	Ketidak lancaran pelayanan kepada masyarakat	3	0,6	0	0
10	Temuan pemeriksaan lainnya	74	13,6	32	43,2
	J u m l a h	543	100	248	45,7

DISPERPUSIP JATIM

Dari tabel diatas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Dari 543 temuan hasil pemeriksaan BPKP tahun 1995/1996 yang menonjol adalah kebocoran yang merugikan negara 87 temuan (16,0%), kelemahan administrasi 102 temuan (18,8%), dan temuan

pemeriksaan lainnya 74 temuan (13,6%). Apabila kita bandingkan dengan hasil pemeriksaan BEPEKA Depkes ternyata jenis temuan yang menonjol berbeda, dapat dilihat pada bagan berikut:

BEPEKA		BPKP	
JENIS TEMUAN	%	JENIS TEMUAN	%
1.Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran	36,6	1.Kelemahan administrasi	18,8
2.Kelemahan administrasi	24,7	2.Kasus yang merugikan negara	16,0
3.Temuan pemeriksaan lainnya.	21,7	3.Temuan pemeriksaan lainnya.	13,6

b. Dari 543 temuan telah dilaksanakan tindak lanjutnya sebanyak 248 temuan atau sekitar 45,7%. Rendahnya pelaksanaan tindak lanjut ini, disebabkan karena temuan yang ditindaklanjuti sebagian besar adalah masalah keuangan (pengembalian keuangan kepada negara) yang memerlukan proses yang cukup lama, karena sebagian besar kerugian negara dikembalikan dengan cara mengangsur sesuai kesepakatan dalam SKTM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak).

c. Pelaksanaan tindak lanjut hampir merata disetiap jenis temuan berkisar antara 33,3% - 60,4%, kecuali ketidak lancaran pelayanan kepada masyarakat belum di ditindak lanjuti. Tindak lanjut yang menonjol adalah pada pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja (60,4%), penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran (57,1%), dan kasus yang merugikan negara (51,7%). Sisa temuan yang belum ditindaklanjuti masih akan terus dipantau sampai tuntas pada tahun - tahun berikutnya.

DISPERPUSIP JATIM

2. Menurut Propinsi

Berdasarkan LHP BPKP yang diterima oleh Itjen Depkes selama tahun 1995/1996, jika dikelompokan menurut Propinsi adalah sebagai berikut :

TEMUAN DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LHP BPKP
MENURUT PROPINSI TAHUN 1995/1996

Tabel. 14

NO	PROPINSI	TEMUAN		JUMLAH T.L	%
		JUMLAH	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DKI JAKARTA	40	7,4	38	95,0
2	JAWA BARAT	90	16,6	36	40,0
3	JAWA TENGAH	32	6,0	23	72,0
4	DI YOGYAKARTA	14	2,6	8	57,1
5	JAWA TIMUR	14	2,6	11	78,6
6	DI ACEH	11	2,0	7	63,6
7	SUMATERA UTARA	30	5,5	19	63,3
8	SUMATERA BARAT	25	4,6	11	44,0
9	R I A U	4	0,8	0	0,0
10	J A M B I	8	1,5	5	62,5
11	SUMATERA SELATAN	60	11,0	22	36,6
12	LAMPUNG	4	0,8	4	100
13	KALIMANTAN BARAT	2	0,4	2	100
14	KALIMANTAN TENGAH	2	0,4	0	0,0
15	KALIMANTAN SELATAN	6	1,1	6	100
16	KALIMANTAN TIMUR	3	0,7	0	0,0
17	SULAWESI UTARA	18	3,3	0	0,0
18	SULAWESI TENGAH	7	1,3	0	0,0
19	SULAWESI SELATAN	16	2,9	99	56,3
20	SULAWESI TENGGARA	10	1,8	5	5,0
21	M A L U K U	47	8,6	9	19,1
22	B A L I	26	4,8	14	53,8
23	NUSA TENGGARA BARAT	35	6,4	2	55,7
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1	0,2	1	100
25	IRIAN JAYA	6	1,1	0	0,0
26	BENGKULU	20	3,7	15	75,0
27	TIMTIM	9	1,6	1	11,1
28	P U S A T	3	0,3	0	0,0
	J U M L A H	543	100	248	45,7

PERPUSIP JATIM

Dari tabel diatas dapat dikemukakan :

a. Penyebaran hasil pemeriksaan BPKP tidak merata di semua provinsi. Hal ini tergantung pada PKPT BPKP, dan tidak semua LHP BPKP diterima Inspektorat Jenderal Dep.Kes, karena sebagian masih akan diterima pada tahun berikutnya sehingga dengan demikian penyebaran temuan tiap propinsi tidak merata.

b. Pelaksanaan tindak lanjut sangat bervariasi dari yang sama sekali belum ada tindak lanjutnya (0%) seperti pada provinsi Riau, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Irja dan Pusat. Adapun propinsi yang pelaksanaan tindak lanjutnya cukup baik (diatas 60%), yaitu propinsi DKI Jakarta (95,0%), Jawa Timur (78,6%), Jawa Tengah (72,0%), DI Aceh (63,6%), Sumut (63,3%), Jambi (62,6%), kemudian provinsi yang pelaksanaan tindak lanjutnya sampai dengan 100 % adalah propinsi Kalsel , Kalbar dan Lampung.

3. **Menurut Program Depkes.**

Apabila temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP tahun 1995/1996 dikelompokkan menurut program Depkes dapat dilihat pada tabel berikut :

DISPERPUSIP JATIM

TEMUAN DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LHP BPKP
MENURUT PROGRAM DEPKES
TAHUN 1995/1996

Tabel. 15

NO	PROGRAM DEPKES	TEMUAN		TINDAK LANJUT	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	**Program Pokok**				
I.1	Penyuluhan Kes Masyarakat	16	3,0	11	69
I.2	Pelayanan Kes. Masy	50	9,2	16	32,0
I.3	Pelayanan Kes Rujukan & RS	148	27,3	75	51,0
I.4	Pencegahan & Pembrant Peny	26	4,8	11	42,3
I.5	Perbaikan Gizi	7	1,3	2	29,0
I.6	Pengawasan Obat & Makanan	45	8,3	24	53,3
I.7	Pembin Pengobatan Tradis	-	-	-	-
II.	**Program Penunjang**				
II.8	Penyed & Pengaw Air Bersih	6	1,1	4	66,6
II.9	Penyehat Ling.Pemukiman	8	1,4	0	0,0
II.10.a	Pendd Kedinasan	41	7,6	25	61,0
II.10.b	Pendd & Pelat Apart Neg	8	1,4	2	25,0
II.11	Pengkaj & Lit Ilpeng Trap	-	-	-	-
II.13	Pembin & Pengemb Pemuda	-	-	-	-
II.14	Peranan Wanita	-	-	-	-
II.15	Pengemb Sistim Infor Kes	-	-	-	-
II.16	Pengemb Sistim Hukum Nas	-	-	-	-
III.	**Program Umum**				
III.17	Peningk Pras & Sar Apart Negara.	9	1,7	8	89,0
III.18	Peningk Efisi Apart Neg	100	18,4	43	43,0
III.19	Penday Sistem & Pelak Was	-	-	-	-
	B U M N	79	14,5	27	34,2
	Jumlah Seluruh	543	100	248	45,7

DISPERPUSIP JATIM

Memperhatikan tabel diatas, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Jumlah temuan yang menonjol menurut Program Depkes adalah Kesehatan Rujukan dan RS 148 temuan (27,3%), Program Peningkatan Aparatur Negara 100 temuan (18,4%).

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 50 temuan (9,2%). Apabila kita bandingkan dengan hasil pemeriksaan BEPEKA, temuan yang menonjol tidak jauh berbeda, karena pada prinsipnya ada kesamaan persepsi tentang obyek pemeriksaan, yaitu sasaran utama pemeriksaan tertuju pada obyek/program utama departemen yang memberikan dampak pelayanan kepada masyarakat.

b. Hasil pemeriksaan pada BUMN mendapatkan temuan yang cukup besar, dari 41 LHP dihasilkan 79 temuan atau 14,5% dari keseluruhan temuan yang ada. Hal ini wajar karena pelaksanaan pengawasan BUMN hanya dilakukan oleh BPKP dan BEPEKA, disamping SPI setempat. Intervensi pengawasan reguler Inspektorat Jenderal Depkes belum sampai kepada BUMN, kecuali ada permintaan khusus dari Menteri Kesehatan. Karena Itjen Depkes tidak melaksanakan secara reguler pemeriksaan terhadap BUMN, maka BPKP memprioritaskan pemeriksaan terhadap BUMN yang ada di lingkungan Depkes.

c. Pelaksanaan tindak lanjut bervariasi yaitu antara 0% (Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman) s.d 89% (Program Peningkatan Sarana & Prasarana) dengan rata-rata 45,8%.

4. **Menurut Unit Utama.**

Hasil pemeriksaan BPKP yang menonjol yaitu pada unit Setjen (32,2%), Ditjen Yanmedik (24,3%) dan Ditjen Binkesmas (13,3%) disamping pemeriksaan terhadap BUMN Depkes (14,5%).

DISPERPUSIP JATIM

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tiap unit utama sebagian besar masih rendah, kecuali DitJen YanMedik (53%) dan pada DitJen POM (51,1%).

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TEMUAN DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LHP BPKP MENURUT UNIT UTAMA TAHUN 1995/1996

Tabel. 16

NO	PROGRAM UNIT UTAMA	TEMUAN		JUMLAH	%
		JML	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Sekretariat Jenderal	175	32,2	80	45,7
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	-
3	Ditjen Binkesmas	72	13,3	33	45,8
4	Ditjen Yanmedik	132	24,3	70	53,0
5	Ditjen P2M & PLP	40	7,4	15	37,5
6	Ditjen POM	45	8,3	23	51,1
7	Litbangkes	-	-	-	-
	Jumlah Unit Utama	464	85,5	221	47,6
	Jumlah B U M N	79	14,5	27	34,2
	Jumlah seluruh	543	100	248	45,7

DISPERPUSIPATIM

B. Penyebab Penyimpangan.

Dari keseluruhan penyebab penyimpangan hasil pemeriksaan BPKP tahun 1995/96 sebagian besar diakibatkan karena kelemahan pengawasan melekat (86,7%) dengan penyebab utama:

1. Kelemahan dalam pembinaan personil 42 penyebab (17%)
2. Kelemahan dalam unsur pencatatan & pelaporan 38 penyebab (15%)
3. Kelemahan dalam rencana 36 penyebab (15%)

Secara rinci penyebab penyimpangan dan kelemahannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

JUMLAH PENYEBAB PENYIMPANGAN TEMUAN BPKP

TAHUN 1995/1996

Tabel. 17

KODE	U R A I A N	JML	%
	A. KELEMAHAN PENGAWASAN MELEKAT :		
101	Kelemahan dalam organisasi	14	5,6
102	Kelemahan dalam kebijakan	20	8,0
103	Kelemahan dalam rencana	36	15,0
104	Kelemahan dalam prosedur	34	14,0
105	Kelemahan dalam pencatatan & pelaporan	38	15,0
106	Kelemahan dalam pembinaan personil	42	17,0
107	Kelemahan dalam pengawasan intern (Internal Review)	31	13,0
	S u b T o t a l I	215	87,0
	B. PENYEBAB LAIN DILUAR KELEMAHAN PENGAWASAN MELEKAT.		
201	Penyebab Ekstern hambatan kelancaran Proyek	16	6,0
202	Penyebab Ekstern hambatan kelancaran Tugas Pokok Instansi	10	4,0
203	Penyebab ketidaklancaran pelayanan Aparatur Pemerintah/BUMN/BUMD kepada masyarakat	7	2,0
	S u b T o t a l II	33	13,0
	T O T A L	248	100

III. HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA.

A. TEMUAN DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA.

Seperti halnya hasil pemeriksaan BPKP, Itjen Depkes juga ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BEPEKA di lingkungan Departemen Kesehatan, baik Satuan Kerja maupun Proyek Pembangunan. Hasil pelaksanaan tindak lanjut ini dilaporkan secara reguler sebagai bahan laporan tahunan hasil pengawasan BEPEKA dalam bentuk "Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan BEPEKA".

DISPERPUSIP JATIM

Selama tahun 1995/1996 BEPEKA telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan di lingkungan Depkes sebanyak 17 obyek dengan menghasilkan 166 temuan. Dari sejumlah temuan tersebut telah ada tindak lanjutnya sebanyak 161 temuan atau sekitar 97,0%.

Temuan hasil pemeriksaan BEPEKA yang menonjol adalah:

1. Penyimpangan ketentuan pelaksanaan anggaran (36,6%)
2. Kelemahan administrasi (24,7%)
3. Temuan pemeriksaan lainnya (21,7%).

Secara rinci hasil pemeriksaan BEPEKA selama tahun 1995/96 adalah sebagai berikut:

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA
MENURUT JENIS TEMUAN
TAHUN 1995/1996

Tabel.18

KODE	JENIS TEMUAN	JUMLAH TEMUAN	PROSENTASE	JUMLAH T.L.	PROSENTASE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kebocoran yang merugikan negara	-	-	-	-
02	Kewajiban penyetoran kepada negara	1	0,6	1	100
03	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	1	0,6	1	100
04	Pelanggaran terhadap prosedur dan tatakerja	7	4,2	7	100
05	Penyimpangan dari ketentuan anggaran	61	36,7	57	93,4
06	Hambatan terhadap kelancaran pembangunan	2	1,2	2	100
07	Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok	3	1,8	3	100
08	Kelemahan administrasi	41	24,7	41	100
09	Ketidak lancaran pelayanan kepada masyarakat	14	8,5	14	100
10	Temuan pemeriksaan lainnya	36	21,7	35	97,2
	J u m l a h	166	100	161	97,0

DISPERPUSIP JATIM

B. PENYEBAB PENYIMPANGAN TEMUAN BEPEKA

Hasil pemeriksaan BEPEKA tahun 1995/96 penyebab penyimpangan 93,6% diakibatkan karena kelemahan pengawasan melekat, dengan penyebab utama:

1. Pembinaan personil 61 penyebab penyimpangan (26,2%)
2. Kelemahan dalam kebijakan 50 penyebab penyimpangan (21,4%)
3. Kelemahan dalam rencana 44 penyebab penyimpangan (18,9%)

Secara rinci penyebab penyimpangan hasil pemeriksaan BEPEKA dapat dilihat dalam tabel berikut:

DISPERPUSIP JATIM

JUMLAH PENYEBAB PENYIMPANGAN
TEMUAN BEPEKA TAHUN 1995 / 1996

Tabel. 19

KODE	U R A I A N	JML	%
	A. KELEMAHAN PENGAWASAN MELEKAT :		
101	Kelemahan dalam organisasi	6	2,6
102	Kelemahan dalam kebijakan	50	21,4
103	Kelemahan dalam rencana	44	18,9
104	Kelemahan dalam prosedur	34	14,6
105	Kelemahan dalam pencatatan & pelaporan	23	9,9
106	Kelemahan dalam pembinaan personil	61	26,2
107	Kelemahan dalam pengawasan intern (Internal Review)	-	-
	S u b T o t a l I	218	93,6
	B. PENYEBAB LAIN DILUAR KELEMAHAN PENGAWASAN MELEKAT.		
201	Penyebab Ekstern hambatan kelancaran Proyek	-	-
202	Penyebab Ekstern hambatan kelancaran Tugas Pokok Instansi	3	1,2
203	Penyebab ketidaklancaran pelayanan Aparatur Pemerintah/BUMN/BUMD kepada masyarakat	12	5,2
	S u b T o t a l II	15	6,4
	T O T A L	233	100

IV. PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TP.5000

Pengawasan masyarakat merupakan salah satu jenis pengawasan yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan kesehatan.

Diharapkan pengawasan masyarakat sebagai kontrol sosial atas pelaksanaan kegiatan aparatur pemerintah bidang pelayanan masyarakat merupakan masukan bagi pimpinan Depkes untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undang an yang berlaku.

Kantor Wakil Presiden, sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan, khususnya pelaksanaan pengawasan intern pemerintah, membuka kotak pos sebagai sarana pengawasan masyarakat yang lebih dikenal dengan nama Tromol Pos 5000.

Inspektorat Jenderal Departemen diberi tugas oleh Kantor Wapres untuk mengkoordinir pemantauan kebenaran pengaduan masyarakat melalui Tromol Pos 5000 yang menyangkut tugas dan fungsi departemen masing-masing. Hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Kantor Wapres secara reguler.

Melihat tingkat kebenaran pengaduan masyarakat yang cukup tinggi (36,2%), maka keberadaan Tromol Pos 5000 sangat penting sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan aparatur pemerintah khususnya di Departemen Kesehatan. Dan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak baik dari unit yang paling tinggi maupun unit yang paling rendah untuk menelusuri kebenaran laporan pengaduan yang ada.

DISPERPUSIP JATIM

1. **Menurut Jenis Informasi.**

Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat melalui Tromol Pos 5000 pada Departemen Kesehatan selama tahun 1995/1996 penangannya cukup intensif. Dari 79 kasus pengaduan telah ditangani sebanyak 58 kasus atau sekitar 73,4%, dan yang mengandung kebenaran sebesar 36,0% atau 21 kasus.

Adapun jenis informasi masyarakat yang menonjol menyangkut masalah Penyalahgunaan wewenang Aparat Pemerintah, sebanyak 30 kasus (38,0%), Kepegawaian/ Ketenagakerjaan, sebanyak 16 kasus (20,3%) dan Pelayanan Masyarakat, sebanyak 18 kasus (22,8%).

Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TP. 5000
MENURUT JENIS INFORMASI
TAHUN 1995/1996

Tabel. 20

KODE	JENIS INFORMASI	KASUS		DITANGGAPI		MENGANDUNG KEBENARAN	
		JML	%	JML	%	JUMLAH	%
01	Penyalahgunaan wewenang Aparatur Pemerintah	30	38,0	24	80,0	8	26,6
02	Pelayanan masyarakat	18	22,8	12	66,6	6	33,3
03	Korupsi/pungutan liar	6	7,7	5	83,3	0	0
04	Kepegawaian/ketenaga-kerjaan	16	20,3	10	62,5	4	25,0
05	Keagrariaan/Perumahan	1	1,3	0	0	0	0
06	Hukum / Peradilan	1	1,3	1	0	1	100
07	Tatalaksana Pemerintah/ Birokrasi	7	8,6	6	85,7	2	33,3
08	Kewaspadaan Nasional	-	-	-	-	-	-
09	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-
	J u m l a h	79	100	58	73,4	21	36,2

DISPERPUSIP JATIM

2. Menurut Propinsi

Pengaduan masyarakat melalui TP.5000 apabila dikelompokan menurut propinsi terlihat bahwa pengaduan terbanyak di Pusat, sebanyak 21 kasus (26,8%), Sumut sebanyak 9 kasus (11,4%), Jateng sebanyak 6 kasus (7,8%).

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TP. 5000
MENURUT PROPINSI
TAHUN 1995/1996

Tabel. 21

NO	PROPINSI	KASUS		DITANGGAPI		MENGANDUNG KEBENARAN	
		JML	%	JML	%	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	4	5,0	2	50,0	0	0
2	JAWA BARAT	4	5,0	2	50,0	1	50,0
3	JAWA TENGAH	6	7,8	6	100	3	50,0
4	DI YOGYAKARTA	1	1,2	1	100	0	0,0
5	JAWA TIMUR	3	3,9	3	100	1	33.3
6	DI ACEH	-	-	-	-	-	-
7	SUMATERA UTARA	9	11,4	8	8,9	4	50,0
8	SUMATERA BARAT	2	2,5	2	100	1	50,0
9	R I A U	2	2,5	2	50,0	1	50,0
10	J A M B I	1	1,2	1	50,0	0	0
11	SUMATERA SELATAN	11	13,9	8	72,8	2	25,0
12	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-
13	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-
14	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-
15	KALIMANTAN SELATAN	1	1,2	1	100	0	0
16	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-
17	SULAWESI UTARA	2	2,5	2	100	0	-
18	SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-
19	SULAWESI SELATAN	3	3,9	2	66,6	2	100
20	SULAWESI TENGGARA	1	1,2	1	100	0	100
21	M A L U K U	3	3,9	3	100	0	0
22	B A L I	-	-	-	-	-	-
23	NUSA TENGGARA BARAT	1	1,2	1	100	1	100
24	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-
25	IRIAN JAYA	2	2,5	1	50	0	0
26	BENGKULU	1	1,2	1	100	0	0
27	TIMOR TIMUR	1	1,2	1	100	0	0
28	P U S A T	21	26,8	10	100	5	50,0
	JUMLAH PROPINSI	79	100	58	73	21	36,2
29	B U M N	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SELURUH	79	100	58	73	21	36,2

DISPERPUSIP JATIM

Dapat dikemukakan bahwa dari kasus yang telah ditanggapi ternyata yang mengandung kebenaran diatas angka rata-rata (36,2%) adalah SulSel (100%), SulTra (100%), N.T.B.(100%),

Sedangkan daerah lain berada dibawah angka rata-rata.

V. PENYIMPANGAN DAN TINDAK PENERTIBAN DI LINGKUNGAN DEPKES RI.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lingkungan Depkes RI dilaporkan kepada Menteri Kesehatan RI dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI (MENPAN). Selama tahun 1995/1996 di lingkungan Departemen Kesehatan RI terjadi tindakan penertiban terhadap 5 pelaku penyimpangan berupa Pelanggaran Disiplin PNS.

Jenis tindakan penertiban yang dilakukan terhadap 5 pelaku penyimpangan secara rinci dapat dilihat pada tabel sbb:

DISPERPUSIP JATIM

JUMLAH PELAKU PENYIMPANGAN
MENURUT JENIS TINDAKAN
TAHUN 1995/1996

Tabel. 22

NO	JENIS TINDAKAN	JML TINDAKAN	JML PELAKU
	(1)	(2)	(3)
1	Tegoran lisan.	1	1
2	Tegoran tertulis	1	1
3	Penundaan kenaikan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 12 bl	1	1

	(1)	(2)	(3)
4	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 thn	1	1
5	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permitaan sendiri	1	1
	J u m l a h	5	5

VI. PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.

Jumlah kasus kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional terhadap obyek pemeriksaan dilingkungan Depkes RI serta kejadian lain yang dilaporkan oleh kepala satker, Pimpro dan Ka Kanwil terdapat 215 kasus, baru diselesaiakn 24,4 % dari nilai kerugian negara selama tahun 1995/1996 sebesar Rp 1.787.381.013,22.

Penanganan kasus-kasus kerugian negara tersebut sedang dalam proses koordinasi dengan BPKP dan BEPEKA yang karena berbagai alasan perlu dikaji kembali untuk kemungkinan dapat dihapuskan penyelesaiannya.

Data kerugian negara menurut Unit Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

DISPERPUSIP JATIM

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DILINGKUNGAN DEPKES RI MENURUT UNIT UTAMA + BUMN
TAHUN 1995/1996
Per 31 Maret 1996

Tabel. 23

NO	UNIT UTAMA	JUMLAH KERUGIAN	%	PENYELESAIAN	%	SISA KERUGIAN	JML KASUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DITJEN YANMEDIK	1.273.104.582,13	71,2	340.768.779,12	26,8	932.335.803,01	74
2	SEKRETARIAT JENDERAL	347.923.531,04	19,5	83.303.915,79	23,9	264.619.615,25	75
3	DITJEN BINKESMAS	65.584.191,00	3,8	3.719.983,00	5,7	61.864.208,00	19
4	DITJEN PPM & PLP	36.936.489,90	2,1	2.396.588,00	6,5	34.539.901,90	15
5	DITJEN POM	7.882.929,84	0,4	3.644.905,56	46,2	4.238.024,28	16
6	B U M N	55.949.289,31	3,0	2.556.607,08	4,6	53.392.682,23	16
7	INSPEKTORAT JENDERAL	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H	1.787.381.013,22	100	436.390.778,55	24,4	1.350.990.234,67	215

Keterangan : (4) = $\frac{3}{\text{Jml}} \times 100\ \%$ (6) = $\frac{(5)}{(3)} \times 100\%$

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa seluruh kerugian negara sampai dengan 31 Maret 1995/1996 Unit Utama yang mempunyai jumlah kerugian negara tertinggi adalah Ditjen Yan medik Rp. 1.273.104.582,13, berikutnya Sekretariat Jenderal Rp. 347.923.531,04, Ditjen Binkesmas Rp. 65.584.191,00, Ditjen PPM & PLP Rp. 36.936.489.90, Ditjen POM Rp. 7.882.929,84. Dengan jumlah kerugian negara yang ada,setiap unit utama sudah melaksanakan penyelesaian akan tetapi masih ada sisa kerugian seperti apa yang terdapat dalam tabel diatas.

Akan tetapi penyelesaiannya masih sangat kecil ini disebabkan karena berbagai kendala antara lain :

a. Pengembalian dilakukan secara angsuran sringkali tidak dibayarkan seluruhnya.

b. Piutang negara berupa tunggakan pembayaran biaya perawatan. dari penderita di Rumah Sakit tidak mampu atau lari.

DISPERPUSIP JATIM